

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.P.Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)*, Mandar Maju, Bandung;
- Aanje Tehupeiory, 2012, “*Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*”, Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Allan R. Brewer-Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Rafika, Jakarta;
- Djoko Prakoso, 1985, “*Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*”, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- E. Utrecht., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung;
- Edison MS, Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia, Bukittinggi;
- Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013;
- Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata cara mengurus sertifikat tanah*, Visi Media, Jakarta;
- H.Musyair Zainudin.MS, 2010, “*Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta;
- Hans Klecatsky, 1963 “*Reflection on The Rule of Law and in Particular on The Principle of Asministrative Action*” dalam jurnal of The International Commition of Jurist, Vol IV, Nomor 2, 1963
- Helmy Panuh, 2012 “*Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*”, PT.Raja Grafindo Persada, Depok;
- Imam Soetikno, 1987, “*Proses Terjadinya UUPA*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta;
- Kurnia Warman, A, 1998, “*Konversi Hak atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_, B, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk “Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, HuMa, Jakarta Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya. Bandung, Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York, The Balbs Merrill Company Inc;
- Mas’oed Abidin, 2005, “*Ensiklopedi Minangkabau*”, Pusat Pengkajian Islam Minangkabau, Padang Panjang;
- Moh.Yamin Lubis, Abd.Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung;
- Maria Sumardjono, B, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta;
- Maria Sumardjono, A, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta;
- Mohammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Media Abadi, Yogyakarta;
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada media, Jakarta;
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta;
- Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- O. Notomihardjo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,
- Otje Salman. 2004. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama. Jakarta;
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya;

- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1982, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- R. Crieence Le Roy, 1976, *De Vierde Macht*, Alih Bahasa oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya;
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung;
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*. Rajawali Pers, Depok; Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, 1991, *Teori Hukum*, Hassanuddin University Press, Makassar;
- Sahnani, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang;
- Sajuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta;
- Sjachran Basah, 1983, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung, 1985, hlm.11; lihat juga Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Penerbit CV. Rajawali, Cet. Ke-2, Jakarta;
- Sri Sumantri M, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2006, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.;
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Suhatri, 1982, *“Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah”*, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta;
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Syamsul Bahri Dt.Saripado, 1978, *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*, Jakarta;
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Urip Santoso, B, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenanda Group, Jakarta;
- Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung;
- Yozi Ardian, Thesis 2020, *Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Untuk Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman*, Universitas Andalas, Padang.

## **B. Jurnal**



Adek Chandra, 2022, *Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2 Mei 2022

Bambang Suharto, Dan Supadno, 2023, *Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, IJPA (The Indonesian Journal Public Administration), Volume 09 Nomor 01 Juni 2023

Gemala Elfani, Fachri Adnan, 2022, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022

Nana Yogatiyana & Mohammad Arief Hidayatullah, 2022, *Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Tanah Di Indonesia*, Anwarul, Jurnal Pendidikan Dan Dakwah, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2022.

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi dkk, 2023 *Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 3 Nomor 3, Juli 2023

Riduan, Dkk, 2020, *Fektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara*, Jurnal Pencerah Publik, Volume 7 Issue 2, April 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Hukum Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang Mengatur Tentang Pendaftaran Tanah Sporadik;

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

#### **D. Internet**

Badan Pusat Statistik 2018. Solok Selatan Dalam Angka Tahun 2018. BPS-RI: Jakarta

Slamet Hariyanto, *Pendaftaran Hak Ulayat kaum dan Tanah Milik Adat di Sumbar.*  
<https://gagasanhukum.wordpress.com>

